

20. RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar adalah dokumen perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang berjalan simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Proses penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dimulai dengan persiapan penyusunan Renja dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja tahun lalu berdasarkan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2026.
- b. Rumusan program/ kegiatan di dalam RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar
- c. Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Daerah.
- d. Tahun 2026 merupakan tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025 – 2029. Tema Pembangunan Kota Blitar Tahun pada periode 2025-2029 adalah Penguatan Pondasi Transformasi sebagai dasar pembangunan melalui transformasi ekonomi, sosial, lingkungan dan pemerintahan.
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1; dan

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 23); → sesuai OPD
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025–2029 serta disusun mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2026. Adapun tujuan di susunnya Renja ini adalah :

- a) Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2026
- b) Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026
- c) Sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2026 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2026 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang terdiri dari :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan dokumen RKPD Tahun 2026, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2026 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2026. Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat telaah evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target periode akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Pada sub bab ini disajikan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan telaah terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU, IKK, SPM. Pada sub bab ini disajikan table Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah

Berisikan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Isu – isu penting dapat mengambil dari LKJIP Perangkat Daerah Tahun 2024.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai hasil persandingan antara rancangan awal RKPD dengan program/kegiatan/sub kegiatan hasil identifikasi kebutuhan Perangkat Daerah. Pada sub bab ini disajikan table Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil telaah atas Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Pada bab ini juga berisi Tabel Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 – 2027.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan rekapitulasi mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 dengan mencantumkan tagging program/kegiatan/sub kegiatan terhadap SPM/Tematik/Tindaklanjut LKJIP/Keterangan lain. Pada bab ini juga berisi Tabel Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian garis besar mengenai rencana program, kegiatan, sub kegiatan indikator, lokasi, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027. Pada bab ini juga berisi Tabel Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2024 pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Tabel Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.

BAB V PENUTUP

Berisikan Uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disperindag kota Blitar tahun lalu (2025) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2025) dengan mengacu pada APBD tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Disperindag Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2024 (n-2) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ;
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ;
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ;
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun 2025 (n - 1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ;
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ;
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ;
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kota Blitar

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan Perdagangan										
				Bidang Urusan Perdagangan										
				Tujuan : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah Sasaran : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	85.03	Indeks	85.01	85.02	85.01	99.99	85.03	85.03	100
3	30	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Indeks		84.81	83.40	98.34	81.5		
				Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	%		100	100	100	100	100	100
				Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	40	Dokumen	10	10	20	200	10	40	100
				Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan	32	Laporan	8	8	16	200	8	40	125

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
				Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100
				Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang	58	60	58	100	60	176	293
				Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	16	Laporan	4	4	8	97	4	16	100
				Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat	100	%	100	100	100	100	100	100	100

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					daerah yang sesuai standar									
				Sub keg Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	20	Paket	5	5	10	200	5	20	100
				Sub keg Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah orang yg mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan	300	orang	300	300	600	200	300	600	200
				Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100
				Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	44	Paket	11	11	22	200	11	44	100
				Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	14	Paket	3	3	6	200	4	13	93
				Sub Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	25	Paket	31	6	62	1033	7	100	400

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	60	Paket	15	15	45	300	15	75	125
				Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan yang disediakan	21	Paket	7	5	14	280	6	27	129
				Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	144	Dokum en	36	36	72	200	36	144	100
				Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	62	Laporan	50	15	100	667	15	165	266
				Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang tersedia sesuai standar	100	%		100	100	100	100	100	100
				Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit		0		667	0		
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	Unit		0		100	2		

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					yang Disediakan									
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit		2			2	2	100
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit		2			2	2	100
				Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	%	100	100			100	100	100
				Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	192	Laporan		48			48	48	25
				Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96	Laporan		24			24	24	25
				Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100
				Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	12	Unit	3	15	6		40	40	333

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					dan dibayarkan pajaknya									
				Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	Unit		2		0	2		
				Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16	Unit	4	4			4	8	50
				Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	4	Unit	1	1			1		107
				Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang dipelihara/direhabilitasi	18	Unit		4			5		100
				Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	29	%	25.03	24.85			24.9		100
				Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan	3	%		2.25			2.5		125

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					volume usaha perdagangan									
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik	75	%	50	72	70.5	97.92	73.5	73.5	100
				Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	90	%	54.54	80	70	87.50	80	80	75
				Sub Keg. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi Perdagangan	33	Unit	4	8	8	100	8	20	100
				Sub Keg.Fasilitasi Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	32	Unit	7	9	23	256	9	39	125
				Keg.Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	6	%	5	6	16	267	6	27	91
				Sub Keg. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	16	Dokumen	4	4		0	4	8	50
				Sub Keg. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana	15	Dokumen	3	4	9	225	4	16	107

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Distribusi Perdagangan									
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	100	%	100	100	100	100	100	100	100
				Keg.Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat daerah Kab/Kota	Persentase ketersediaan barang penting yang diawasi	100	%	100	100	6	6	100	100	100
				Sub.Keg Koordinasi dan Sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	8	Laporan	2	2	6	300	2	10	125
				Keg. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian harga dan stok barang yang diawasi	100	%	100	100	100	100	100	100	100
				Sub Keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi	Jumlah laporan dan Stok Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting Pada	12	Laporan	2	3	4	133	3	9	75

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
				Keg. Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi di Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	100	%	100	100	100	100	100	100	100
				Sub.Keg. Pengawasan pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	8	Laporan	2	2	6	300	2	10	125
3	30	06		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	55	%	56.2	45	56.2	125	50	50	91
				Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	23500	Unit	4431	5800	5700	98	6000	16131	69
				Sub Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera ulang	23200	Unit	4431	5800	5700	98	5900	16031	69
				Sub Keg. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha dibidang metrology legal yang dibina	1200	Orang	940	300	1290	430	300	2530	211
				Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi seKtor perindustrian terhadap PDRB	9.95	%		9.87		0	9.91		
				Sasaran : Meningkatnya produktivitas Industri	Persentase peningkatan	2.5	%		1.5		0	2		

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					produktivitas Industri									
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan IKM	6	%	2.07	3.5	2.07	59	5	6	100
				Keg. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Persentase IKM yang memperoleh pembinaan	6	%		5		0	5	5	83
				Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	15	Dokumen	3	4		0	4	7	47
				Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	19	Dokumen	4	5	13	260	5	22	116
				Sub.Keg.Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	22	Dokumen	6	6	12	200	5	23	105

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Disperindag Kota Blitar terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Faktor penghambat pencapaian kinerja : masih mencukupi pemeriksaan BPK
Tindak lanjut yang diperlukan: akan segera dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan.
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : kerjasama antara tim sangat baik dan saling mendukung, sarana dan prasarana terpenuhi dalam memfasilitasi kegiatan
Faktor penghambat pencapaian kinerja : jaringan wifi masih kurang lancar sehingga memperlambat pekerjaan terutama terkait administrasi
Tindak lanjut yang diperlukan: mempertahankan kinerja tim agar dapat melaksanakan kegiatan dengan baik monitoring dan evaluasi kerja karyawan/karyawati di bidang pengembangan perdagangan pasar, menambah server internet sehingga semua ruangan di kantor terfasilitasi jaringan internet dengan baik dan lancar.
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : adanya operasi pasar dengan komoditas yang mengalami kenaikan harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri dan kebutuhan informasi terkait harga dan stok bapokting untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok
Faktor penghambat pencapaian kinerja : harga pasar yang fluktuatif sehingga perlu pemutusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang cepat belum ditetapkannya perda peredaran minol
Tindak lanjut yang diperlukan: akan diadakan operasi pasar murah pengawasan pupuk bersubsidi dan LPG bersubsidi terus dilaksanakan monitoring harga dan stok bapokting pengawasan peredaran minol sesuai ketentuan perda tidak gudang distributor ketika terjadi kenaikan harga atau kelangkaan barang
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : alat standart sudah diverifikasi di bsml2 Yogyakarta sudah ada SDM Metrologi
Faktor penghambat pencapaian kinerja : ada masyarakat sebagian tidak mau tera ulang dengan alasan UTTP yang dimilikinya masih bagus
Tindak lanjut yang diperlukan : dilakukan tera/tera ulang di wilayah dengan cara *door to door*, dengan pendekatan ke masyarakat dengan sosialisasi dan tera ulang *door to door*
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : potensi IKM di kota Blitar yang tinggi untuk dapat bersaing di skala regional dan nasional

Faktor penghambat pencapaian kinerja : -permodalan- belum adanya peningkatan mutu dan pengembangan produk
Tindaklanjut yang diperlukan: fasilitasi bantuan produksi untuk peningkatan kapasitas produksi fasilitasi perizinan usaha dan pemasaran peningkatan sumber daya IKM

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar perlu menentukan strategi dan kebijakan untuk memperbaiki capaian kinerja selanjutnya. Arah strategi dan kebijakan pada perencanaan ke depan atas evaluasi capaian realisasi pelaksanaan renja adalah sebagai berikut:

1. Akan lebih mengoptimalkan penggalan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan barang milik daerah, dan peningkatan tertib pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatkan hubungan kerjasama antar daerah maupun pihak lain guna mendorong pertumbuhan ekonomi di kota Blitar.
3. Meningkatkan promosi dan pemasaran atas produk IKM.
4. Memfasilitasi legalitas pelaku usaha dan peningkatan mutu serta produk dari IKM.
5. Kolaborasi dengan OPD atau pihak lain dalam rangka menghidupkan pasar rakyat.
6. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap distribusi dan peredaran minuman beralkohol.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024 dapat dikatakan berhasil, karena berkaitan dengan ekonomi yang sudah mulai membaik dan mulai beranjak naik, sehingga dalam pelaksanaannya dimasa mendatang masih perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

No.	Indikator	IKU/IK K/SPM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada Kab/Kota	IKU	1,75 %	2	2,25	2,5	1,85	2,22	2,22	2,22	3	3	
2	Persentase Peningkatan produktivitas Industri	IKU	0,75 %	1	1,5	2	0,83	1,072	1,072	1,072	2,5	2,5	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	IKU	A (80)	A(81)	A(81,5)	A(85)	A(84)	A(85,01)	A(85,01)	A(85,01)	A(85,03)	A(85,03)	
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/IUTS/SIUP toko swalayan)	IKK	15	15,5	16	16,5	5,27	15,5	15,5	15,5	17	17	
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	IKK	70	70	70	70	53,91	70	70	70	70	70	
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	IKK	35	40	45	50	56,27	40	40	55	55		
4	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	IKK	1	1,3	1,5	1,7	1,45	1,3	1,3	2	2		
5	Persentase jumlah hasil pemantauan	IKK	5,50	6	6,50	7	100	6	6	7,50	7,50		

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu penting yang berkembang, antara lain:

1. Peningkatan Pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana pasar rakyat sesuai standart pelayanan
2. Peningkatan mutu dan daya saing IKM Kota Blitar
3. Pembinaan dan penataan PKL sesuai Perwali dengan melibatkan OPD terkait (LKJIP)
4. Peningkatan volume perdagangan besar dan eceran
5. Peningkatan produktivitas industri kecil dan menengah (IKM)

- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh PD dengan prediksi PAGU Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA SKPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2026 disajikan secara lengkap pada Tabel 2.3 Dokumen RENJA berikut.

Dari review terhadap rancangan awal RKPD, ada beberapa perubahan pada pagu indikatifnya. Hal ini dikarenakan penyesuaian pagu yang ada dan skala prioritas kegiatan.

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah sebagai berikut:

1. Di tahun 2026 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (terdapat perubahan dibanding tahun sebelumnya).
2. Atas pagu indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan disandingkan dengan program kegiatan prioritas daerah maka diperlukan tambahan anggaran untuk peningkatan volume usaha perdagangan (optimalisasi pasar rakyat), dukungan kerjasama antar daerah, peningkatan nilai ekspor daerah, dan pertumbuhan industri kecil/menengah di kota Blitar.
3. Diperlukan upaya-upaya yang maksimal (dukungan dana dan SDM) dalam rangka pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				18.820.601.394	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				15.747.917.100	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				15.747.917.100	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.30	8.653.175.800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.30	8.653.175.800	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	27.998.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	31.299.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dokumen	10.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 laporan	10.001.000	
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kota Blitar	Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	1 Data	3.300.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah berita acara hasil forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Berita Acara	4.998.500	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah berita acara hasil forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Berita Acara	4.998.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kota Blitar	Jumlah dokumen perencanaan urusan selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kota Blitar	Jumlah dokumen perencanaan urusan selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen	3.000.000	
	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kota Blitar	Jumlah berita acara hasil sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah dalam rangka mendukung target pembangunan nasional melalui koordinasi teknis pembangunan	0 Berita Acara	0	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kota Blitar	Jumlah berita acara hasil sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah dalam rangka mendukung target pembangunan nasional melalui koordinasi teknis pembangunan	1 Berita Acara	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	57 Orang/bulan	6.507.001.100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	6.504.001.100	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	6.503.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	6.503.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	4.001.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	4.001.100	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase Pelayanan Barang Milik Daerah Sesuai Standart	100 %	4.995.200	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase Pelayanan Barang Milik Daerah Sesuai Standart	100 %	4.995.200	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.995.200	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.995.200	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase Pelayanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Daerah	%	0	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase Pelayanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Daerah	100 %	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	0	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai Standar	100 %	166.083.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai Standar	100 %	166.083.500	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	68.101.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	68.101.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	350 Orang	97.982.500	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	350 Orang	97.982.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	540.718.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	537.417.600	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	2 Paket	34.999.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	2 Paket	34.999.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan	2 paket	84.496.500	Penyediaan Peralatan dan	Kota Blitar	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	84.511.800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			kantor yang disediakan			Perlengkapan Kantor					
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	10.495.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	10.495.600	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	15 paket	69.995.600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	15 paket	79.681.600	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kota Blitar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	29.997.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kota Blitar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	29.997.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	24 dokumen	6.733.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	24 dokumen	6.733.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Blitar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 laporan	13.002.300						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 laporan	290.998.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 laporan	290.998.500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	253.530.018	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	253.530.018	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Blitar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	79.520.300	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Blitar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	79.520.300	
	Pengadaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	69.959.792	Pengadaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	69.959.792	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	104.049.926	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	104.049.926	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Blitar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	0	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Blitar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	722.717.082	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	722.717.082	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah mebel yang dipelihara	24 Laporan	361.999.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah mebel yang dipelihara	24 Laporan	361.999.500	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	360.717.582	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	360.717.582	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	430.131.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	430.131.800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	179.990.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	179.990.800	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	24.910.400	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	24.910.400	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	24.990.600	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	24.990.600	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.240.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.240.000	
2.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kota Blitar	Persentase usaha perdagangan yang berizin	75.71 %	29.997.800	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kota Blitar	Persentase usaha perdagangan yang berizin	75.71 %	29.997.800	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha	Kota Blitar	Persentase usaha perdagangan yang difasilitasi perijinannya sesuai standar	5.44 %	29.997.800	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat	Kota Blitar	Persentase usaha perdagangan yang difasilitasi perijinannya sesuai standar	5.44 %	29.997.800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Toko Swalayan					Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan					
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Blitar	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	95 Dokumen	29.997.800	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Blitar	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	95 Dokumen	29.997.800	
	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Kota Blitar	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	1 laporan	0	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Kota Blitar	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	1 laporan	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kota Blitar	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	6.450.000.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kota Blitar	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	7.068.446.350	
						Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	80 %	3.506.952.600	
						Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	11 Unit	2.000.000	
						Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	11 Unit	3.503.952.600	
						Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Kota Blitar	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	1 Kegiatan	1.000.000	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kota Blitar	IKM Layanan Sarana Perdagangan	Indeks	6.450.000.000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kota Blitar	IKM Layanan Sarana Perdagangan	84 Indeks	2.943.047.400	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada	1 Dokumen	6.450.000.000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi	1 Dokumen	2.943.047.400	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					Perdagangan			
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kota Blitar	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100 %	150.000.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kota Blitar	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100 %	150.000.000	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase ketersediaan barang sesuai kebutuhan	100%	140.000.000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase ketersediaan barang sesuai kebutuhan	100%	140.000.000	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	65.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	65.000.000	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam	1 Laporan	75.000.000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	75.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1 (Satu) Kabupaten/Kota								
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	100 %	10.000.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	100 %	10.000.000	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	10.000.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	10.000.000	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kota Blitar	Nilai Ekspor Barang	100 %	249.763.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kota Blitar	Nilai Ekspor Barang	100 %	249.763.000	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah kerjasama ekspor produk unggulan	1 kerjasama ekspor	249.763.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah kerjasama ekspor produk unggulan	1 kerjasama ekspor	249.763.000	
	Pameran Dagang Nasional	Kota Blitar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha	99.932.000	Pameran Dagang Nasional	Kota Blitar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha	99.932.000	
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kota Blitar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang	1 Pelaku Usaha	149.831.000,	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kota Blitar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	1 Pelaku Usaha	149.831.000,	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Produk Ekspor Unggulan								
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100 %	91.189.700	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100 %	91.189.700	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Blitar	Persentase penanganan pengaduan konsumen Persentase UTT bertanda tera	100 %	91.189.700	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Blitar	Persentase penanganan pengaduan konsumen Persentase UTT bertanda tera	100 %	91.189.700	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Blitar	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4954 Unit	82.189.700	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Blitar	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4954 Unit	82.189.700	
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Blitar	Jumlah Pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina	200 Orang	9.000.000	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Blitar	Jumlah Pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina	200 Orang	9.000.000	
7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kota Blitar	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	14 %	123.790.800	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kota Blitar	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	14 %	123.790.800	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kota Blitar	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi	25 %	123.790.800	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan	Kota Blitar	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi	25 %	123.790.800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Produk Dalam Negeri					
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	50 Orang	18.790.800	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	50 Orang	18.790.800	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	350 UMKM	105.000.000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	300 UMKM	100.000.000	
						Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	10 UMKM	5.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				3.072.684.294				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.072.684.294	
8	PROGRAM PERENCANAAN DAN	Kota Blitar	Persentase Realisasi Investasi	1.5 %	3.016.751.394	PROGRAM PERENCANAAN DAN	Kota Blitar	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	1.5 %	3.016.751.394	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PEMBANGUNAN INDUSTRI		Sektor Industri dan Kawasan Industri			PEMBANGUNAN INDUSTRI					
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah IKM	5479 IKM	3.016.751.394	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah IKM	5479 IKM	3.016.751.394	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	4 Dokumen	65.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	4 Dokumen	65.000.000	
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	2.951.751.394	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	2.948.751.394	
						Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi	1 Dokumen	1.000.000	
9	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Kota Blitar	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	50 %	30.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Kota Blitar	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	50 %	30.000.000	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase usaha industri yang difasilitasi perijinannya sesuai standar	50 %	30.000.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase usaha industri yang difasilitasi perijinannya sesuai standar	50 %	30.000.000	
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single	Kota Blitar	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor	1 Dokumen	30.000.000	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi	Kota Blitar	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor	1 Dokumen	30.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kota Blitar	Persentase industri yg terdaftar di SIiNAS	34.4 %	25.932.900	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kota Blitar	Persentase industri yg terdaftar di SIiNAS	34.4 %	25.932.900	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase usaha industri yang direkomendasikan ijinnya dalam SIINAS	50 %	25.932.900	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase usaha industri yang direkomendasikan ijinnya dalam SIINAS	50 %	25.932.900	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan,	1 Dokumen	25.932.900	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan,	1 Dokumen	25.932.900	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
Jumlah				18.820.601.394		Jumlah			18.820.601.394		

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran RPJPD Kota Blitar Tahun 2025-2029. Prioritas utama, tema atau fokus pembangunan pada periode 2025-2029 adalah Penguatan Pondasi Transformasi sebagai dasar pembangunan melalui transformasi ekonomi, sosial, lingkungan dan pemerintahan. Fokus/Tema pembangunan tahun 2026 adalah Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Pelayanan Dasar Yang Didukung Kualitas SDM Dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan pada setiap urusan pemerintahan diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita sebagai upaya pencapaian visi dan agenda prioritas pembangunan nasional, yang mencakup upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil, dan berdaulat. Arah kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan adalah Percepatan pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas dan Peningkatan Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global dalam mendukung Asta Cita Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Adapun penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar di tahun 2026 sebagaimana dalam *Tabel 3.1* di bawah ini.

Sasaran Pembangunan Daerah dalam Rancangan Akhir Renja dan RKPD memang tidak mungkin sama, karena RKPD merupakan dokumen yang harus dipedomani dalam penyusunan Renja sehingga tujuan dan sasaran RKPD tidak mungkin sama dengan Renja karena tidak sepadan. RKPD merupakan dokumen tahunan skala kota sedangkan Renja merupakan dokumen skala perangkat daerah.

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026-2027

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan		Realisasi		Target		KET
						2024	2025	2026	2027	
1.	Tujuan :Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	Nilai PDRB (ADHB) Perdagangan	Nilai PDRB berdasarkan lapangan usaha sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor atas dasar harga berlaku (ADHB) yang dikeluarkan oleh BPS	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (dalam milliar) Kota Blitar pada tahun n	Milyar Rupiah	2.268,88	2.291,57	2.314,48	2.337,63	
		Nilai PDRB (ADHB) Industri Pengolahan	Nilai PDRB berdasarkan lapangan usaha sektor industri pengolahan atas dasar harga berlaku (ADHB) yang dikeluarkan oleh BPS	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha sektor industri pengolahan (dalam milliar) Kota Blitar pada tahun n	Milyar Rupiah	910,55	919,66	928,85	938,14	
	Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Volume perdagangan	Volume perdagangan adalah Estimasi Nilai Tambah yang dihitung berdasarkan Nilai Nominal yaitu Nilai saat ini tanpa memperhitungkan nilai inflasi atau faktor pasar lainnya dan Nilai Riil yaitu Nilai Nominal yang telah disesuaikan dengan Inflasi. Data volume perdagangana didapat dari pendataan usaha perdagangan yang dilakukan disperindag Usaha perdagangan yang dimaksud adalah usaha Perdagangan mencakup semua usaha /Perusahaan	Volume perdagangan pada Tahun N	Triliun Rupiah	1,953	1,957	1,961	1,964	IKU

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan		Realisasi		Target		KET
						2024	2025	2026	2027	
			dengan skala usaha menengah dan besar pada Kategori G (Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor), yaitu KBLI 45, 46 dan 47.							
	Sasaran : Meningkatnya produktivitas Industri	Nilai produksi industri	Produktivitas adalah produksi dari sejumlah komoditi dan jasa yang benar-benar dihasilkan dari proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan industri itu sendiri dalam kurun waktu tertentu Harga dari total hasil produksi yang terjual dinyatakan dalam rupiah	Nilai produksi industri pada Tahun N		844.366.054	844.366.054	886.584.356	930.913.573	IKU
2.	Sasaran : Meningkatnya kualitas kinerja penunjang perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai SAKIP mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat pada tahun berjalan		86.05	86.05	86.6	86.7	

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.3 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan.

Strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus diselesaikan selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkungan pembangunan sektor Perindustrian dan Perdagangan di Kota Blitar. Adapun Strategi tersebut adalah :

1. Peningkatan volume perdagangan besar dan eceran
2. Peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM)

Faktor internal dan eksternal yang menjadi pertimbangan perumusan program/kegiatan/sub kegiatan meliputi:

4. Pelaksanaan amanat peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Kesesuaian dengan Asta Cita, Nawa Bhakti Satya, dan visi misi kepala daerah terpilih.

3.4 Kebijakan

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kebijakan tersebut adalah :

1. Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana dan pengembangan kapasitas
2. Optimalisasi pengawasan perdagangan
3. Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM
4. Peningkatan pemasaran hasil industri
5. Peningkatan nilai produksi IKM sebagai barang ekspor
6. Peningkatan kerjasama perdagangan antar daerah
7. Peningkatan nilai ekspor perdagangan
8. Pembinaan kepada pelaku usaha industri

3.5 Program dan Kegiatan

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2026 adalah 10 Program, 14 Kegiatan dan 35 sub kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana Tabel 3.6 berikut :

Tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	IKK	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target	
				2024	2025	2026	2027
	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	Nilai total penjualan perdagangan antar wilayah adalah nilai ekspor. nilai ekspor adalah nilai berupa uang yang diperoleh melalui penjualan barang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh ekportir dalm juta rupiah	Realisasi Jumlah nilai penjualan barang ke kab/kota lain dalam 1 tahun (dalam juta rupiah) dibagi Target jumlah nilai penjualan barang ke kab/kota lain dalam 1 tahun (dalam juta rupiah) dikalikan 100 %	100	100	100	100
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Tera dalah Ukuran yang menunjukkan seberapa besar ketepatan dan kesesuaian alat ukur takar timbang serta perlengkapannya setelah melalui proses tera sah oleh pihak berwenang. Proses tera sah ini memastikan bahwa alat ukur memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh regulasi dan dapat digunakan untuk transaksi yang memerlukan ketepatan. Tera Sah: Alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi standar akurasi sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh lembaga metrologi atau instansi terkait.	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku dibagi Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota dikalikan 100 %	48,17	47,88	48,26	48,65

No	IKK	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target	
				2024	2025	2026	2027
		UTTP: Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. Ini termasuk berbagai jenis alat yang digunakan untuk mengukur, menimbang, dan takar bahan atau barang.					
	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
3	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	1. PDRB sektor industri pengolahan nonmigas adalah Nilai PDRB berdasarkan lapangan usaha sektor industri pengolahan nonmigas atas dasar harga berlaku yang dikeluarkan oleh BPS. Pertumbuhan yang maksud adalah kenaikan nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas terhadap tahun sebelumnya. 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB adalah Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB atas dasar harga berlaku yang dikeluarkan BPS (target diperoleh dari target sasaran RPJMD). 3. Berdasarkan Permenperin Nomor 64 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Industri Berdasarkan tenaga kerja dan investasi,	Nilai outcome diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: (Indikator 1 + Indikator 2 + Indikator 3 + Indikator 4 + Indikator 5) dikalikan bobot IKK Outcome 40%	75	76	77	78

No	IKK	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target	
				2024	2025	2026	2027
		Tenaga Kerja IKM adalah tenaga kerja tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota adalah nilai berupa uang yang diperoleh melalui penjualan barang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh ekportir dalm juta rupiah. 5. Nilai Investasi sektor industri adalah nilai tanah, bangunan, mesin peralatan, sarpras, tidak termasuk modal kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri. yang bersumber OSS (DPMPTSP)					
4	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Investasi sektor industri dan kawasan industri adalah investasi sektor industri pengolahan yang datanya didapatkan dari OSS (DPMPTSP)	Nilai investasi sektor industri dan kawasan industri dibagi total investasi seluruh sektor dikali 100%	11,2	11,3	11,4	11,5
5	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan	Perusahaan Industri dan kawasan industri meliputi industri kecil, menengah dan kawasan peruntukan industri. Pengawasan industri adalah kegiatan penting untuk menjamin kepatuhan dan kualitas operasional industri. Objek pengawasan mencakup	Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibagi dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan dikali 100%	0	75	80	85

No	IKK	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target	
				2024	2025	2026	2027
	Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan	perusahaan industri dan kawasan industri yang terdaftar di SIINas. Indikator yang mengukur persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi efektivitas fungsi pengawasan dan tingkat kepatuhan pelaku industri terhadap ketentuan yang berlaku.					
6	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan	Kepatuhan dikatakan baik jika melakukan pelaporan berkala sesuai ketentuan pada aplikasi SIINAS	Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibagi seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan dikali 100%	0	75	80	85
7	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Laporan informasi industri dan informasi lain sektor industri secara akurat, lengkap, dan tepat waktu dengan ketentuan: - Jika laporan disampaikan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret maka berbobot 100% - Jika laporan disampaikan setelah tanggal 31 Maret maka berbobot 0%	Laporan informasi industri dan informasi lain sektor industri secara akurat, lengkap, dan tepat waktu dengan ketentuan	0	100	100	100

Tabel 3.6 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
					[Meningkatkan fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah]	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
					-	-	
3	30	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	
					[Meningkatkan fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah]		
3	30	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
3	30	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	
3	30	01	2.01	0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		
						Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
					-		
3	30	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
						Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
					[Meningkatkan fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah]		
3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Barang Milik Daerah Sesuai Standart	
3	30	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
3	30	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Daerah	
3	30	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai Standart	
3	30	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
3	30	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
3	30	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
3	30	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
3	30	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
3	30	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
3	30	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	
3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
3	30	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase usaha perdagangan yang berizin	
					[Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha]	persentase usaha perdagangan yg berizin	
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase usaha perdagangan yang difasilitasi perijinannya sesuai standar	
3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
						Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
						Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
3	30	02	2.01	0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik		
						Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
					-	-	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan Yang Ditingkatkan Kualitasnya	
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		
						Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
						Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
3	30	03	2.01	0003	Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota		
						Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	
					[Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi]		
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	IKM Layanan Sarana Perdagangan	
3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
					[Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan barang sesuai kebutuhan	
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	
3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang	
					[Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor]		
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama ekspor produk unggulan	
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional		
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	
3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
					[Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk]	Indeks kepuasan konsumen terhadap layanan perlindungan konsumen Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		
						Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		
					[Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri]	Jumlah kerjasama penggunaan produk lokal daerah	
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		
3	30	07	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		
					-	-	
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	
					[Meningkatnya realisasi pembangunan industri]		
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM	
3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					-		
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		
					[Meningkatnya realisasi pembangunan industri]	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
					-	-	
3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
3	31	02	2.01	0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota		
						- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
					[Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian]	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase usaha industri yang difasilitasi perizinannya sesuai standar	
3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		
						Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri yg terdaftar di SIINAS	
					[Meningkatnya pemanfaatan informasi industri]	Persentase industri yg terdaftar di SIINAS	
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase usaha industri yang direkomendasikan ijinnya dalam SIINAS	
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan tahun 2026 dan pagu indikatif tahun 2026 secara keseluruhan. Perumusan program dan kegiatan tersebut didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, evaluasi capaian kinerja, permasalahan, isu strategis, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Untuk mendukung pencapaian sasaran, selanjutnya dirumuskan program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2026. Program dan kegiatan prioritas tersebut diharapkan dapat memicu tercapainya target kinerja utaman Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2026 serta mendukung terwujudnya target capaian nasional, provinsi dan Daerah.

Tabel. 4.1.

Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2024
pada Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Tahun 2025 seluruh pasar rakyat Mendapatkan anggaran pemeliharaan, untuk pasar legi sudah banyak yang bocor dan retak jadi perlu dilakukan revitalisasi	a. melaksanakan pemeliharaan pada semua pasar rakyat b. Tahun depan perlu mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan menganggarkan revitalisasi pasar legi.	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan - Sub Kegiatan Penyediaan sarana distribusi perdagangan
2	Terlaksananya pembinaan Pedagang diseluruh Pasar Rakyat atas Pemanfaatan kios sesuai Dengan mempedomani Perwali Nomor 46 Tahun 2018	Melaksanakan pembinaan pedagang diseluruh Pasar Rakyat atas pemanfaatan kios sesuai dengan mempedomani Perwali Nomor 46 Tahun 2018	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya - Sub Kegiatan Penyediaan sarana distribusi perdagangan
3	Dilaksanakan monitoring pembinaa dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi dengan OPD terkait	Melaksanakan pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi dengan OPD terkait	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan - Sub Kegiatan pemberdayaan sarana distribusi perdagangan
4	Mengevaluasi data pedagang sebagai dasar penertiban Kios dan Loss yang tidak digunakan sehingga	Melaksanakan evaluasi data pedagang sebagai dasar penertiban Kios dan Los yang	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembinaan terhadap pengelola sarana

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	dapat ditindaklanjuti dengan pemberitahuan, klarifikasi, peringatan dan Langkah penyesuaian sesuai dengan Perwali Nomor 46 Tahun 2018	tidak digunakan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan pemberitahuan, klarifikasi, peringatan dan langkah penyesuaian sesuai dengan Perwali Nomor 46 Tahun 2018	distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya - Sub Kegiatan Penyediaan sarana distribusi perdagangan
5	Mengadakan kegiatan GEMPAR “Gerakan ASN Belanja di Pasar Rakyat Kota Blitar “ sehingga pasar rakyat menjadi rame lagi	Mengadakan kegiatan GEMPAR “Gerakan ASN Belanja di Pasar Rakyat Kota Blitar “ sehingga pasar rakyat menjadi rame lagi	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya - Sub Kegiatan Penyediaan sarana distribusi perdagangan
6	Perlu adanya pelayanan terpadu satu pintu untuk IKM di Kota Blitar yang dapat memfasilitasi permasalahan usaha IKM yang di Tahun 2024 direncanakan akan dibentuk Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sektor dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM dan memberikan bantuan peralatan produksi	Melaksanakan Pembentukan Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sektor dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM dan juga tetap memberikan bantuan peralatan produksi	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat
7.	Akan dilakukan pemantauan dan pengawasan baik bagi industri yang sudah mempunyai IUI maupun industri yang mengajukan IUI	Mempersiapkan dan melaksanakan pemantauan dan pengawasan bagi industri yang mempunyai IUI maupun industri yang mengajukan IUI	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
8.	Mengembangkan Database data IKM dan Penambahan kelengkapan informasi	Melakukan pengembangan database IKM dan kelengkapan informasinya	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			- Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat

4.2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Pagu Indikatif Tahun 2026

Rencana kerja dan pendanaan mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan baik prioritas perangkat daerah maupun operasional yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KOTA BLITAR
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.	.			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				18.820.601.394				22.350.350.679
3	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				15.747.917.100				19.340.635.000
3	3	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Blitar	86.30	8.653.175.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86.30	9.468.735.000
				[Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah]	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Kota Blitar	86.30	8.653.175.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86.30	9.468.735.000
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kota Blitar	100 %	31.299.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	35.600.000
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	8 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Dokumen	11.000.000
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	8 Laporan	10.001.000,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Laporan	11.000.000
				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kota Blitar	1 Data	3.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.500.000
				[Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah]	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Kota Blitar	86.3	8.653.175.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
				Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	1 Berita Acara	4.998.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Berita Acara	5.500.000

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Kota Blitar	13 Dokumen	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3.300.000
				Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kota Blitar	1 Berita Acara	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Berita Acara	3.300.000
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kota Blitar	100 %	6.507.001.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	7.154.400.000
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	57 Orang/ bulan	6.503.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		57 Orang / bulan	7.150.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKP	Kota Blitar	12 laporan	4.001.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 laporan	4.400.000
				[Meningkatkan fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah]	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Kota Blitar	86.3	8.653.175.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	Kota Blitar	100 %	4.995.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	5.500.000
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar	1 Laporan	4.995.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	5.500.000
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Daerah	Kota Blitar	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	4.400.000
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Blitar	12 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	4.400.000
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat	Kota Blitar	100 %	166.083.500	Dana Transfer Umum-DAU		100 %	182.600.000

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Daerah yang sesuai Standar							
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar	4 paket	68.101.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 paket	74.800.000
				Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	350 orang	97.982.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350 orang	107.800.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standar	Kota Blitar	100 %	537.417.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	591.635.000
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	2 Paket	34.999.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	38.500.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	2 Paket	84.511.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	92.950.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar	1 Paket	10.495.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	11.550.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	15 Paket	79.681.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Paket	77.000.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar	1 Paket	29.997.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	33.000.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kota Blitar	24 Dokumen	6.733.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Dokumen	7.535.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	20 Laporan	290.998.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Laporan	320.100.000
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Kota Blitar	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	11.000.000

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Elektronik pada SKPD							
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Kota Blitar	100 %	253.530.018	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	294.500.000
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Blitar	2 Unit	79.520.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	80.000.000
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Blitar	1 Unit	69.959.792	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	77.000.000
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar	2 Unit	104.049.926	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	110.000.000
				Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kota Blitar	1 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	27.500.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Sesuai Standar	Kota Blitar	100 %	722.717.082	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	837.100.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar	24 Laporan	361.999.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Laporan	398.200.000
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	1 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	88.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	13 Laporan	360.717.582	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Laporan	350.900.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Kota Blitar	100 %	430.131.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	363.000.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar	13 Unit	179.990.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Unit	198.000.000

[illegible]

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	3	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Kota Blitar	18.18 %	6.450.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18.18 %	9.105.000.000
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan dalam kondisi baik	Kota Blitar	81,82 %	3.506.952.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		%	3.605.000.000
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	11 Unit	2.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Unit	3.000.000
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	11 Unit	3.503.952.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Unit	3.600.000.000
				Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Sistem Resi Gudang	Kota Blitar	1 Kegiatan	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Unit	2.000.000
				[Meningkatkan kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi]	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya		18.18	6.450.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	IKM Layanan Sarana Perdagangan	Kota Blitar	84 Indeks	2.943.047.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		84 Indeks	5.500.000.000
				Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	1 Dokumen	2.943.047.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5.500.000.000
3	3	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Kota Blitar	100 %	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	162.500.000
				[Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Kota Blitar	100 %	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	162.500.000
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan	Persentase ketersediaan barang sesuai kebutuhan	Kota Blitar	100 %	140.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	151.500.000

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Blitar	12 Laporan	65.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	69.000.000
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Blitar	1 Laporan	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	82.500.000
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Kota Blitar	100 %	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	11.000.000
				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kota Blitar	1 Laporan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	11.000.000
3	3	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang	Kota Blitar	100 %	249.763.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	220.000.000
				[Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor]	Nilai Ekspor Barang	Kota Blitar	100 %	249.763.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	220.000.000
				Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama ekspor produk unggulan	Kota Blitar	4 Kerjasama Ekspor	249.763.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Kerjasama Ekspor	220.000.000
				Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Kota Blitar	5 Pelaku Usaha	99.932.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Pelaku Usaha	110.000.000

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kota Blitar	1 Pelaku Usaha	149.831.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Pelaku Usaha	110.000.000
3	3	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Blitar	100 %	91.189.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	147.400.000
				[Meningkatkan tertib niaga dan mutu produk]	Indeks kepuasan konsumen terhadap layanan perlindungan konsumen Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Kota Blitar	48.26 84	91.189.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang ditera	Kota Blitar	100 %	91.189.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	147.400.000
					Jumlah jenis BDKT yang diawasi		2 jenis				2 jenis	
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kota Blitar	4954 Unit	82.189.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4954 Unit	137.500.000
				Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kota Blitar	200 Orang	9.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Orang	9.900.000
3	3	07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								
				[Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri]	Jumlah kerjasama penggunaan produk lokal daerah	Kota Blitar	10	123.790.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi	Kota Blitar	25 %	123.790.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 %	171.000.000
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang	Kota Blitar	50 Orang	18.790.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Orang	82.500.000

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Produksi Dalam Negeri							
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	350 UMKM	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350 UMKM	82.500.000
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Kota Blitar	10 UMKM	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		UMKM	6.000.000
3	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				3.072.684.294				3.009.715.679
3	3	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Kota Blitar	1.5 %	3.016.751.394	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.5 %	2.943.715.679
				[Meningkatnya realisasi pembangunan industri]	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Kota Blitar	1.5 %	3.016.751.394	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.5 %	2.943.715.679
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM	Kota Blitar	5479 IKM	3.016.751.394	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5479 IKM	2.943.715.679
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Blitar	4 Dokumen	65.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	82.500.000
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kota Blitar	1 Dokumen	1.000.000			Dokumen	2.000.000
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Blitar	5 Dokumen	2.948.751.394	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	2.855.215.679

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Blitar	1 Dokumen	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dokumen	2.000.000
				Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi	Kota Blitar	1 Dokumen	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dokumen	2.000.000
3	3	03	1	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Kota Blitar	50 %	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 %	33.000.000
				[Meningkatkan kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian]	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Kota Blitar	50 %	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 %	33.000.000
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase usaha industri yang difasilitasi perijinannya sesuai standar	Kota Blitar	100 %	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	33.000.000
				Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kota Blitar	1 Dokumen	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	33.000.000
3	3	04	1	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri yg terdaftar di SIINAS	Kota Blitar	0 %	25.932.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 %	33.000.000

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				[Meningkatnya pemanfaatan informasi industri]	Persentase industri yg terdaftar di SIINAS	Kota Blitar		25.932.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase usaha industri yang direkomendasikan ijinnya dalam SIINAS	Kota Blitar	50 %	25.932.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 %	33.000.000
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kota Blitar	1 Dokumen	25.932.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	33.000.000
JUMLAH								18.820.601.394				22.350.350.679

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2026 yang berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun (2025-2029) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2026. Rencana Kerja ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024 dan 2025, sebagai pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan di dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan, memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

- a. Rumusan program/ kegiatan di dalam RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- b. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun 2025 dan tahun 2026.
- c. Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD

2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Blitar tahun 2026;
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 dengan berpedoman kepada Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2026;
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2026.
- d. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2025 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam menjalani tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Dalam rangka sinergitas perencanaan untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, koordinasi dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses perencanaan, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

- c. Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan
- d. Dengan ditetapkan Renja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan beedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, sajian dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat kepada siapapun juga atau setidaknya dapat mengetahui kedudukan tugas dan fungsi serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar. Memperhatikan percepatan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan mengingat rencana kerja dilakukan dengan kurun waktu satu tahun anggaran maka untuk mencapai tujuan sesuai dengan target masing-masing kegiatan perlu mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.